

## BAB II

### GAMBARAN ORGANISASI

#### 2.1 Sejarah Singkat BPKP

Sejarah Singkat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 1983 dan diperbaharui dengan Keppres No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2005, dalam perjalanannya senantiasa merespon tuntutan kebutuhan manajemen pemerintahan.

Dengan mengacu kepada tiga pilar good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, BPKP sebagai internal auditor pemerintah telah berupaya membantu manajemen pemerintah mewujudkan good governance. Untuk itu BPKP melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi dan perannya. Peran terkini itu adalah sebagai " internal auditor pemerintah yang profesional dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan good governance ".

Peran ini menuntut dilakukannya perubahan paradigma di dalam tubuh BPKP dari sekadar fungsi attestasi kepada fungsi quality assurance. Hal ini tercermin pada kegiatan-kegiatan BPKP saat ini yang tidak lagi didominasi oleh audit tetapi juga kegiatan-kegiatan yang bersifat konsultasi, asistensi, dan evaluasi manajemen pemerintahan yang sangat dibutuhkan dan direspon dengan baik oleh pemerintah saat ini.

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan salah satu unit kerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2005. Sedangkan tugas pokok perwakilan BPKP menurut SK Kepala BPKP No.KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, yaitu:

Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP yaitu:

1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan
2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah

4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah
5. Pemberian asistensi penyusunan LAKIP instansi pemerintah pusat dan daerah
6. Evaluasi atas LAKIP instansi pemerintah pusat dan daerah
7. Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, PT. Pertamina, Cabang Usaha PT. Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil, Kontrak Kerjasama, Badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance pada badan usaha milik negara, pertamina, cabang usaha pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerjasama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Investigasi terhadap penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara, badan usaha milik Negara dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dari instansi pemerintah lainnya.
10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan
11. Pelaksanaan administrasi perwakilan BPKP

## **2.2 Visi dan Misi Perusahaan**

### **2.2.1 Visi BPKP**

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

### **2.2.2 Misi BPKP**

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

## **2.3 Tugas,Fungsi dan Wewenang BPKP**

Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP memiliki unit mandiri yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Lampung bertugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.1 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
3. Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;;
5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;;
6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program kebijakan pemerintah yang strategis;
8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penguasaan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;

12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
14. Pelaksanaan dan Pelayanan administrasi Perwakilan BPKP

### **2.3.2 Wewenang**

Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPKP mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
6. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
  - a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya.
  - b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survey laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang di perlukan dalam pengawasan;
  - c. Melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-lainnya;
  - d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan baik hasil pengawasan BPKP sendiri, maupun hasil pengawasan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.4 Lokasi Kantor BPKP**

Tempat Pelaksaan: Jl. Basuki Rahmat No.33, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211

## Struktur Organisasi

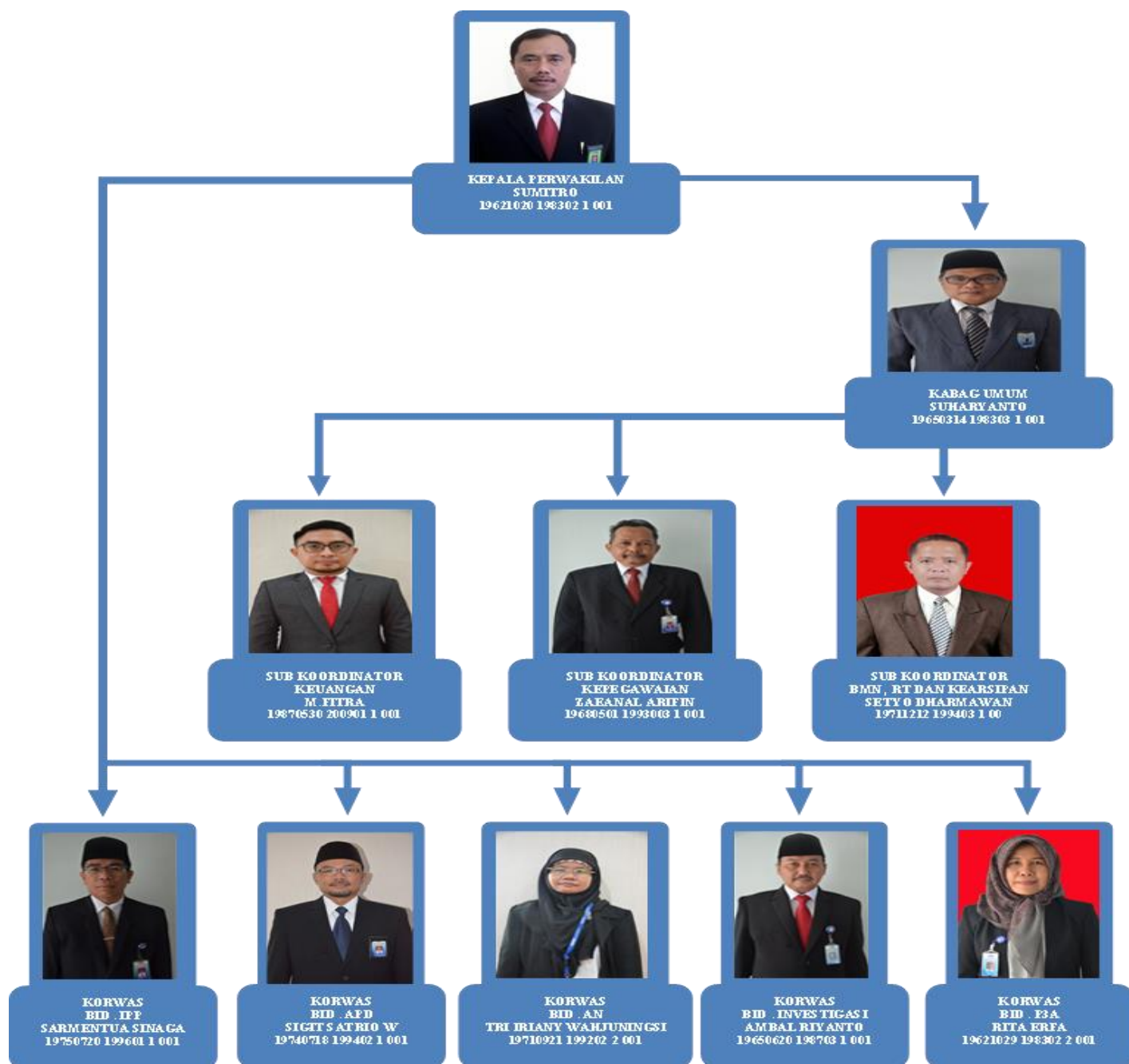
### **2.5 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- Kepala Perwakilan
- Kepala Bagian Umum
- Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
- Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara
- Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi
- Koordinator Pengawasan Bidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIP (P3A)

Sedangkan Kepala Bagian Umum dibantu oleh tiga Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Kepegawaian, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pengelolaan BMN, Rumah Tangga dan Kearsipan.

**Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai berikut:**



Gambar.2.5 Lampiran Struktur Organisasi

### BAB III

### PERMASALAHAN PERUSAHAAN

### **3.1 Analisa Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan**

Dari hasil analisa yang saya lakukan di BPKP LAMPUNG pada bidang IPP adapun permasalahan yang saya temukan adalah sebagai berikut:

1. Sistem pendataan laporan masuk berupa tulis tangan dalam buku folio pada bidang IPP.
2. Penyimpanan data laporan masuk dalam bentuk buku folio pada bidang IPP.
3. Dalam proses pencarian data laporan disimpan dalam lemari rak.

#### **3.1.1 Temuan Masalah**

Adapun masalah dari hasil analisa yang saya temukan di BPKP LAMPUNG pada bidang IPP adalah sebagai berikut:

1. Pendataan data laporan masih mencatat di buku menggunakan kertas buku folio.
2. Pada pengarsipan masing-masing laporan masih diberi penomoran pada kaset sehingga tidak efektif dan efisien.
3. Dalam hal pencarian data sulit dicari karna laporan ditumpuk dalam box dan di susun dalam lemari rak.

#### **3.1.2 Perumusan Masalah**

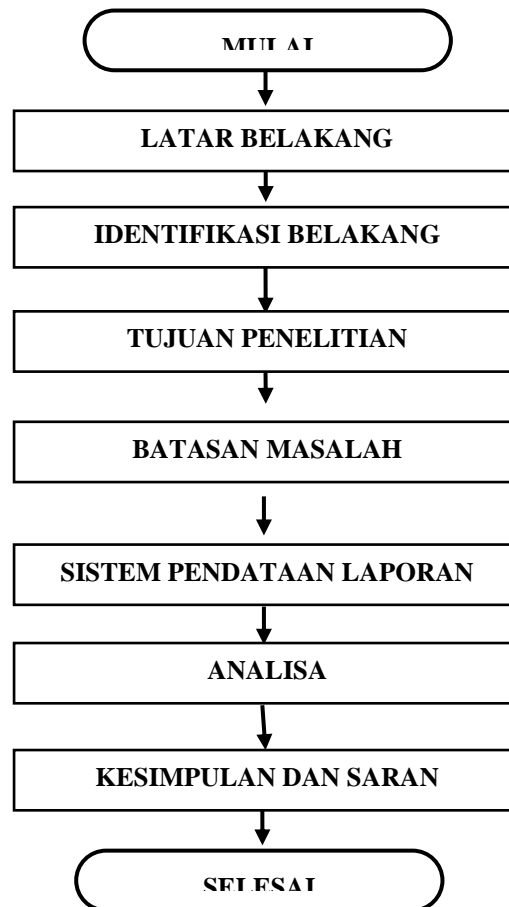
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Merancang Sistem E-Arsip pada Bidang IPP di BPKP Lampung?
2. Bagaimana memberikan informasi mengenai pendataan Laporan pada bidang IPP secara cepat, tepat dan efisien?
3. Bagaimana merancang database pendataan Laporan untuk penyimpanan data laporan dengan tepat.

#### **3.1.3 Kerangka Pemecah Masalah**



Dalam pengerjaan laporan kerja praktek ini langkah demi langkah harus dilakukan secara terstruktur sebagai berikut :



*Gambar 3.1.3. Flowchart pemecahan masalah*

## 3.2 Landasan Teori

### 3.2.1 Pengertian Sistem informasi

Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisi untuk mengumpulkan, memasukan, mengolah serta menyimpan data, mengendalikan dan melaporkan informasi yang sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Krismaji.2015)

### 3.2.2 Konsep Dasar *Web*

*Web* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia dan lainnya pada jaringan internet, dokumen-dokumen yang dikelola dalam *web* bisa beraneka jenis seperti pengolah kata, lembar kerja, tabel basis data, presentasi, hypertext dan lain-lain. (Sibero.2013:17)

### 3.2.3 Pengertian Internet

Internet (*Interconnected Network*) adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara jaringan secara global, internet dapat juga disebut jaringan dalam suatu jaringan yang luas, untuk mengantar integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini harus menggunakan protokol yaitu TCP (*Tranmission Control Protocol*) yang bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar. (Sibero.2013:10)

### 3.2.4 Pengertian *Website*

*Website* merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada *website* disebut dengan *web page* dan link dalam *website* memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (*hyper text*), baik diantara page yang disimpan dalam server yang sama maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti *Netscape Navigator*, *Internet Explorer*, *Mozilla Firefox*, *Google Chrome* dan aplikasi browser lainnya (Hakim Lukmanul, 2004).

### 3.2.5 WWW (*World Wide Web*)

WWW (*World Wide Web*), lebih dikenal dengan *web*, merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. *Web* pada awalnya adalah ruang informasi dalam Internet, dengan menggunakan teknologi hypertexts, pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen *web* yang ditampilkan dalam browser *web*. (Sidik dan Pohan.2014:1).

### 3.2.6 Pengertian *Database*

*Database* adalah sekumpulan data store (bias dalam jumlah yang sangat besar) yang tersimpan dalam magnetic disk, optical disk, magnetic drum atau media penyimpanan sekunder lainnya. (Ladjamudin.2013).

### 3.2.7 Pengertian *PHP*

*PHP* adalah pemrograman interpreter yaitu proses penerjemahan baris kode sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan”. *Php* disebut juga pemrograman *Server Side Programming*, hal ini dikarenakan seluruh prosesnya dijalankan pada server. pengguna data mengembangkan kodekode fungsi sesuai kebutuhannya. (Sibero 2011).

### 3.2.8 *Framework*

*Framework* adalah koleksi atau kumpulan potongan-potongan program yang disusun atau diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk membantu membuat aplikasi utuh tanpa harus membuat semua kodenya dari awal. Hakim (2010:3)

### 3.2.9 CMS

*CMS (content management system)* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi (mengubah) isi dari suatu situs *web*.(Buana.2014).

### 3.2.10 Pengertian *Flowchart*

Flowchart merupakan bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan 24 terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi, pada waktu akan menggambar suatu bagan alir. (Supardi.2013:51).

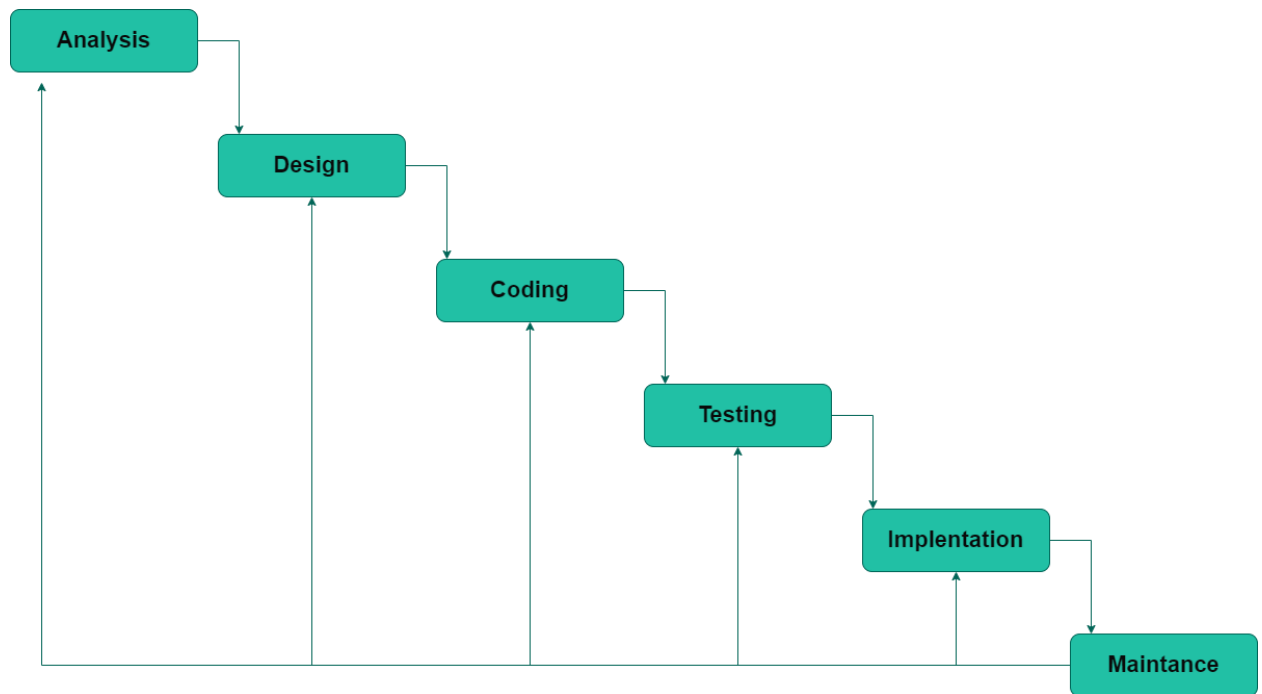
### 3.2.1 Pengertian *Waterfall*

Model *waterfall* adalah model rekayasa perangkat lunak yang sering disebut sekuensial linier, dimana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir kebawa (seperti air terjun) melalui tahapan analisis, desain, kode dan tes.(Pressman.2015).

## 3.3 Metode yang Digunakan

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Metode *Waterfall* (Pendekatan Terstruktur).

Metode ini merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. Metode ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan yaitu:



*Gambar 3.3 Metode waterfall*

### **3.3.2 Analysis**

Adapun proses analisis sistem yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah Pendataan laporan rekapitulasi dengan menanyakan langsung kepada pegawai di divisi IPP yang menangani proses pendataan laporan
- b. Melakukan survey dan wawancara untuk memahami kinerja system pendataan laporan yang sedang berlangsung saat ini, yang selanjutnya digambarkan dalam *FOD (Flow of Document)* dan dianalisis kembali permasalahan - permasalahan tersebut sesuai kinerja sistem yang berjalan.

### **3.3.3 Design**

Tahap penterjemah dari keperluan-keperluan yang dianalisis dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pemakai.yaitu dengan cara menampilkan ke dalam Diagram kontek, Data flow Diagram (Diagram Aliran Data), *Entity Reationship, Diagram* ,Struktur tabel, dan Struktur menu.

### **3.3.4 Coding**

*Desain web* diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan, bahasa program yang penulis gunakan antara lain : *php, Java Script, html, CSS*

### **3.3.5 Testing**

Tahap pengujian perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk mengcover kesalahan-kesalahan dan menjamin bahwa masukan sesuai dengan hasil yang dibutuhkan.

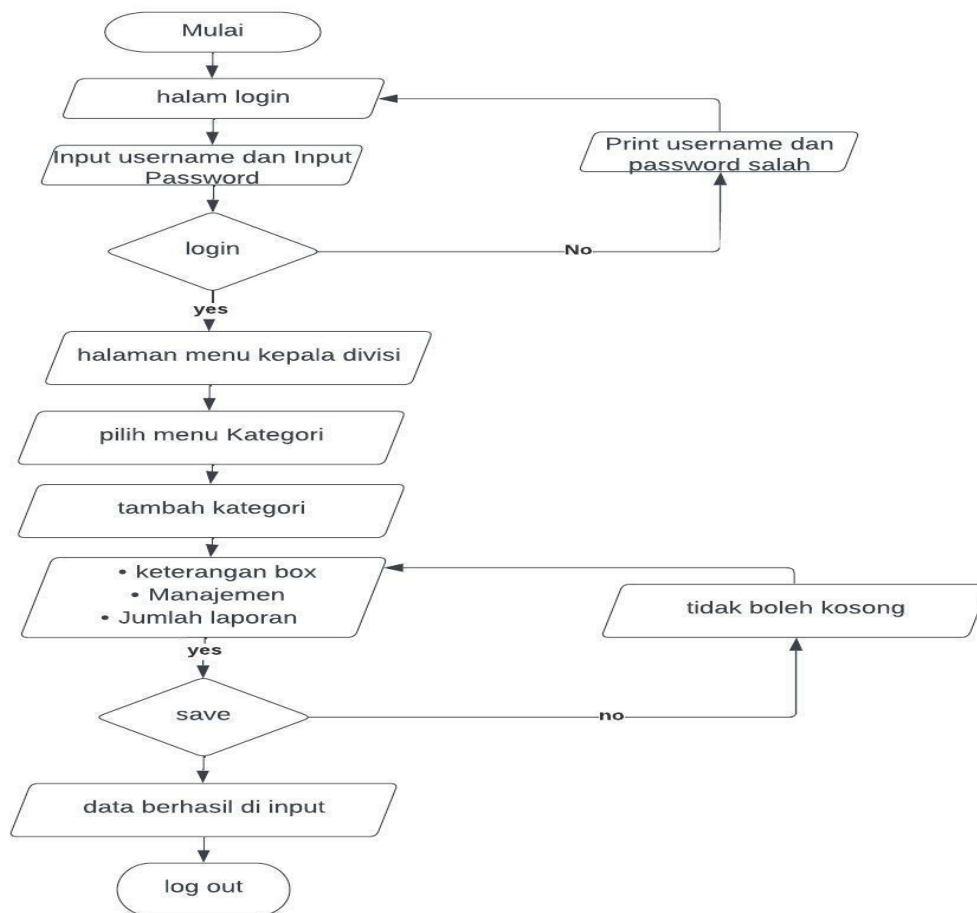
### **3.3.6 Maintenance**

Tahap perawatan sistem yang telah dikembangkan seperti perawatan perangkat lunak, perangkat keras dan media lain yang berhubungan dengan komputer. Pada tahap ini segala kemungkinan mengenai kekurangan perangkat lunak baik berupa kesalahan atau hal-hal yang ditambahkan kedalam perangkat lunak.

### 3.4 Rancangan Program

Rancangan Desain adalah suatu perencanaan awal yang harus dilakukan dalam membangun sebuah sistem. Rancangan Sistem yang diusulkan ditampilkan pada kepala bidang

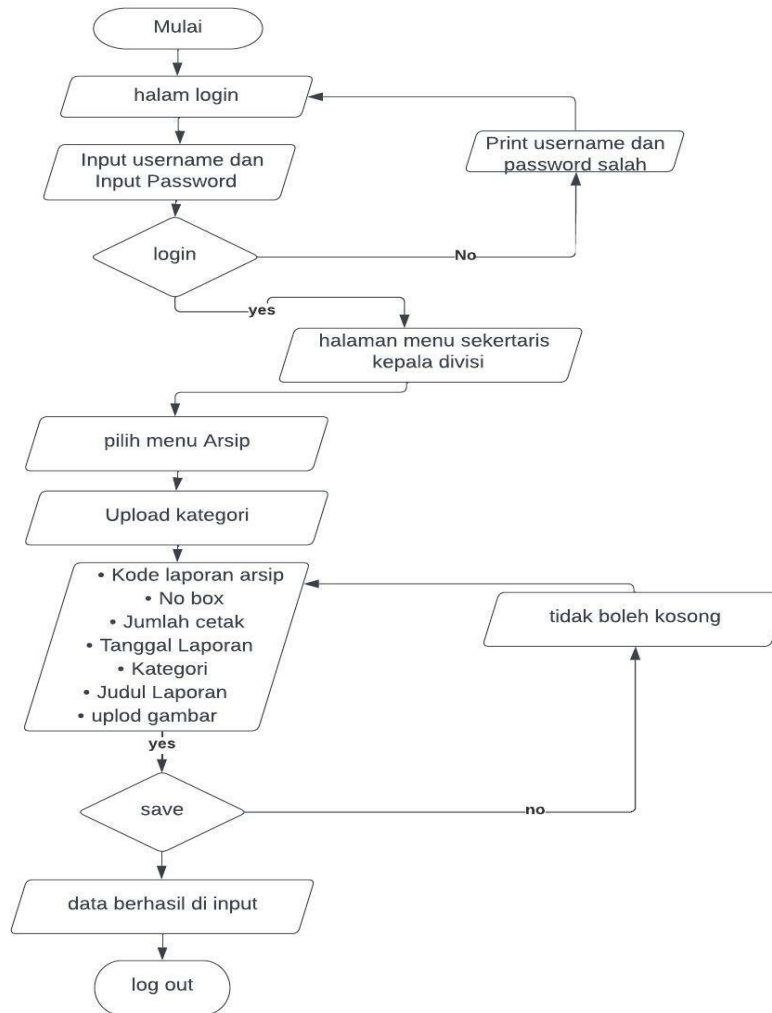
- a. Pada gambar dapat dijelaskan bahwa kepala bidang harus membuat sebuah kategori bertujuan untuk mengklasifikasikan data arsip pada halaman kategori analisis Proses dapat dijabarkan sebagai berikut ini :



*Gambar rancangan program kepala bidang*

- b. Rancangan Sistem yang diusulkan ditampilkan pada Sekretaris kepala bidang

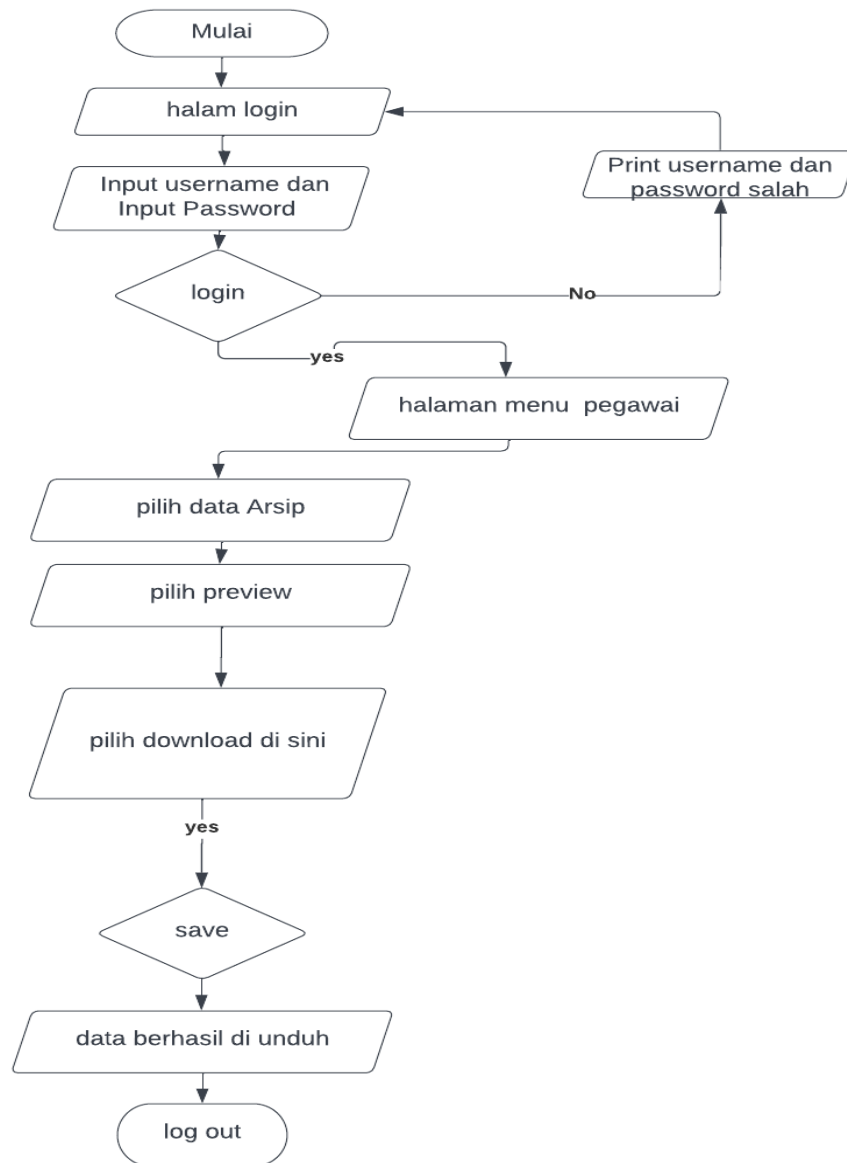
Pada gambar dapat dijelaskan bahwa sekretaris kepala bidang harus menginput pada form arsip bertujuan untuk mengarsipkan data pada halaman arsip analisis Proses dapat dijabarkan sebagai berikut ini :



*Flowchart gambar program sekretaris bidang*

**c. Rancangan Sistem yang diusulkan ditampilkan pada seluruh anggota bidang IPP**

Pada gambar dapat dijelaskan bahwa kepala bidang harus membuat sebuah kategori bertujuan untuk mengklasifikasikan data arsip pada halaman kategori analisis Proses dapat dijabarkan sebagai berikut ini :



*Flowchart gambar program staff bidang IPP*



### 3.4.1 Desain Database

Desain tabel pada *database*

Nama Database : arsip\_ipp.sql

No	Nama field
1	admin
2	arsip
3	kategori
4	petugas
5	riwayat
6	user

*Gambar tabel 3.4.1*

### 3.4.2 Desain tabel admin

Tabel admin adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data kepala bidang IPP pada sistem informasi Arsip berbasis *web*.

No	Nama field	Type	Width
1	admin_id	Int	11
2	admin_nama	Varchar	225
3	admin_username	Varchar	225
4	admin_password	Varchar	225
5	admin_foto	Varchar	225

*Gambar tabel 3.4.2*

### 3.4.3 Desain table petugas

Tabel Petugas adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data sekretaris kepala bidang IPP pada sistem informasi Arsip berbasis *web*.

	Nama field	Type	Width
1	Petugas_id	Int	11
2	Petugas_nama	Varchar	225
3	Petugas_username	Varchar	225
4	Petugas_password	Varchar	225
5	Petugas_foto	Varchar	225

*Gambar tabel 3.4.3*

### 3.4.4 Desain table User

Tabel user adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data Staff IPP pada sistem informasi Arsip berbasis *web*.

No	Nama field	Type	Width
1	User_id	Int	11
2	User_nama	Varchar	225
3	User_username	Varchar	225
4	User_password	Varchar	225
5	User_foto	Varchar	225

*Gambar tabel 3.4.4*

### 3.4.5 Desain tabel kategori

Tabel kategori adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data dokumen IPP pada sistem informasi Arsip berbasis *web*.

No	Nama field	Type	Width
1	kategori_id	Int	11
2	kategori_nama	Varchar	225
3	Kategori_keterangan	Text	
4	Kategori_nokot	Varchar	225

*Gambar tabel 3.4.5*

### 3.4.6 Desain tabel Riwayat

Tabel kategori adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data riwayat pengunduhan dokumen IPP pada sistem informasi Arsip berbasis *web*.

No	Nama field	Type	Width
1	Riwayat_id	Int	11
2	Riwayat_waktu	date	
3	Riwayat_user	Int	11
4	Riwayat_arsip	Int	11

*Gambar tabel 3.4.6*

### 3.4.7 Desain table arsip

Tabel arsip adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data dokumen IPP pada Sistem Informasi Arsip berbasis *web*

No	Nama field	Type	Width
1	arsip_id	Int	11
2	arsip_waktu_upload	date	
3	arsip_petugas	Int	11
4	arsip_kode	Varchar	225
5	arsip_nama	Varchar	225
6	arsip_jenis	Varchar	225
7	arsip_kategori	Int	11
8	arsip_keterangan	Text	
9	arsip_file	Varchar	225
10	arsip_nokot	Varchar	225
11	arsip_jilid	Varchar	225

*Gambar tabel 3.4.7*

### 3.4.8 Desain Input

Desain input merupakan awal dimulainya proses informasi, dan awal dari suatu informasi adalah data. Data yang diambil dalam proses input ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Input yang akan dirancang adalah data yang akan diambil dalam proses input dalam pengolahan datanya adalah Desain Input Form kategori , Desain Input Form arsip.

#### a. Desain input kategori pada Kepala bidang

Pada desain halaman ini digunakan untuk menggambarkan pengimputan kategori apa saja yang diperlukan untuk mengklasifikasikan data kedalam sistem arsip

The wireframe shows a web application layout. On the left is a sidebar with a circular logo and a list of menu items: dashboard, data kategori, data petugas, data user, data arsip, dashboard, riwayat unduh, and logout. The top header contains the text 'data kategori', a notification icon, and a user profile picture labeled 'foto pengguna'. A blue 'kembali' button is located below the header. The main content area has a title 'tambah kategori' and contains three input fields: 'tambah kategori', 'manajemen', and 'jumlah laporan'. A blue 'simpan' button is positioned at the bottom of the form area.

*Gambar desain input kategori kepala bidang*

**b. Desain input arsip pada sekretaris bidang**

Pada desain halaman ini digunakan untuk menggambarkan pengimputan data arsip diperlukan untuk mengklasifikasikan data kedalam sistem yang bertujuan agar data dapat di unduh ke seluruh anggota di bidang IPP

The image shows a wireframe of a web application interface for archiving data. It consists of a sidebar on the left, a header at the top, and a main content area.

- Sidebar:** Contains a 'Logo' and a list of navigation options: 'dashboard', 'data kategori', 'data petugas', 'data user', 'data arsip', 'dashboard', 'riwayat unduh', and 'logout'. Each option is preceded by a radio button.
- Header:** Includes a 'data arsip' label, a 'notification' icon, and a 'foto pengguna' (user photo) placeholder. A 'kembali' (back) button is located below the header.
- Main Content Area:** Contains several input fields:
  - 'kode laporan arsip' (archive report code)
  - 'no box' (box number)
  - 'jumlah cetak' (print count)
  - 'tanggal laporan' (report date)
  - 'kategori' (category)
  - 'judul laporan' (report title)
 An 'Upload' button is positioned at the bottom of the form.

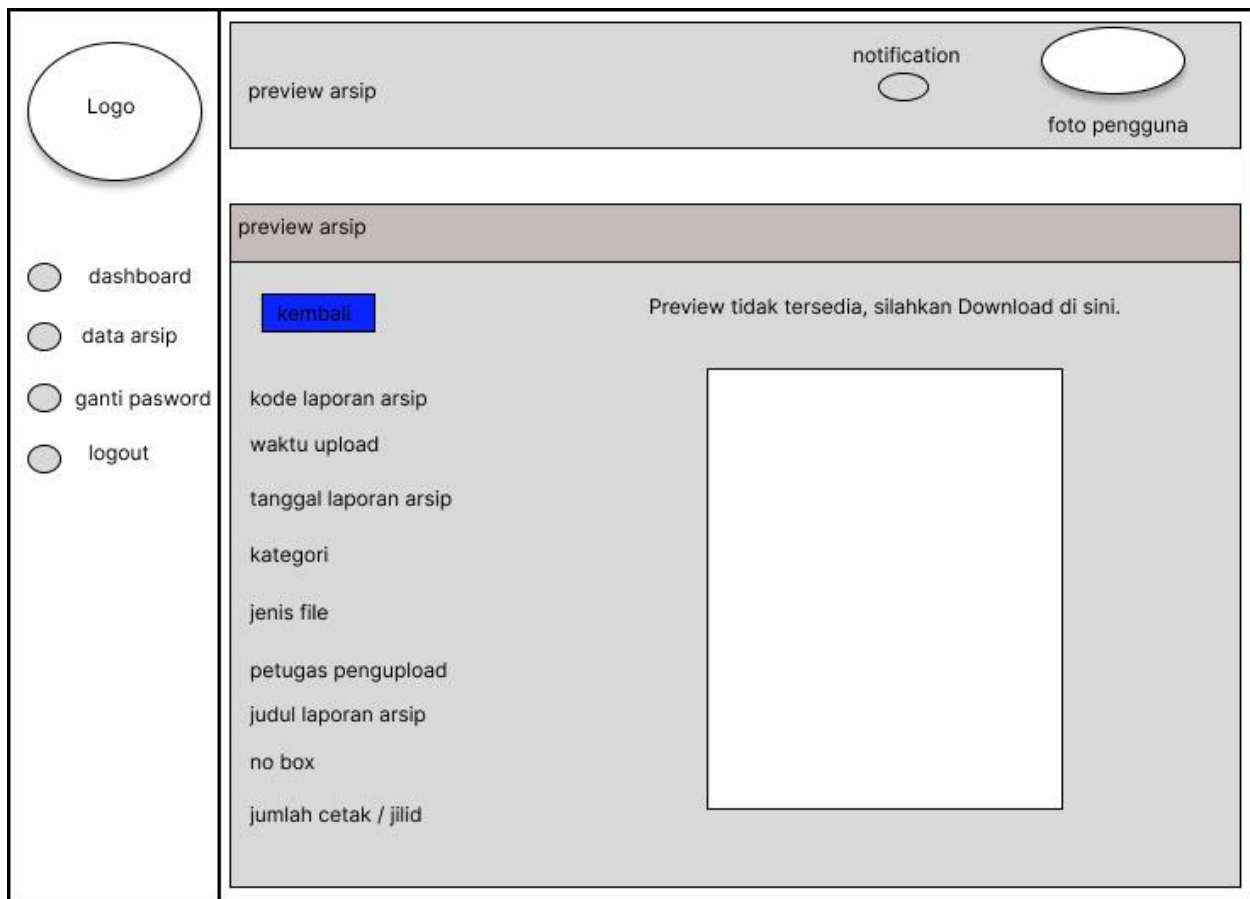
*Gambar desain input kategori serkertaris kepala bidang*

### 3.4.9 Desain Output

Desain *output* adalah rancangan dari tujuan atau hasil akhir dari proses pembuatan sistem informasi. Berikut desain output yang dibuat dalam sistem persediaan alat tulis kantor berbasis web. Tampilan desain output dapat dilihat pada media kertas berikut ini

#### A. Desain Output Arsip pengguna

Pada desain ini digunakan untuk menggambarkan tampilan beserta atribut apa saja yang diperlukan untuk menampilkan laporan hasil arsip pada sistem bidang IPP .



*Gambar desain ouput pegawai*

### B. Desain Output Arsip Sekertaris Bidang dan kepala bidang

Pada desain ini digunakan untuk menggambarkan tampilan atribut apa saja yang diperlukan untuk menampilkan kategori dan arsip pada sistem bidang IPP .



*Desain Output Arsip Sekertaris Bidang dan kepala bidang*